

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pada bidang ekonomi merupakan kebijakan yang bersinggungan langsung serta mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk kebijakan yang berada di dalam otoritas pemerintahan adalah kebijakan fiskal. Dimana kebijakan tersebut mempunyai peran untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya dalam mengatur kegiatan ekonomi, sehingga dapat mengurangi permasalahan fundamental yaitu kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pemerintahan dalam perekonomian nasional yaitu penegakan keadilan melalui distribusi pendapatan diberbagai kelompok dalam masyarakat, menstabilkan ekonomi serta mengatur perpajakan dan pengeluaran Negara.

Pemerintah senantiasa menjaga peran penting APBN sebagai instrumen fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Upaya yang ditempuh antara lain dengan tetap melakukan optimalisasi pendapatan Negara terutama dari sisi perpajakan dan PNBP dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Selain hal tersebut, pemerintah juga senantiasa meningkatkan kualitas belanja secara produktif yang didukung dengan keberlanjutan efisiensi belanja nonprioritas, serta mendorong pengembangan pembiayaan yang efisien dan inovatif dalam mengakselerasi pembangunan (Kementrian Keuangan, 2019)

Di setiap Negara fiskal multiplier mempunyai efek yang berbeda dikarenakan struktur dan perilaku ekonomi. Perbedaan tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti instrument fiskal yang diterapkan, respon kebijakan terhadap inovasi fiskal dan ekspektasi oleh pelaku ekonomi (Barrel dkk, 2012). Sementara menurut Haque dan Montiel (1991) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dampak kenaikan pengeluaran pemerintah yang justru meningkatkan suku bunga riil sehingga berdampak kontraktif terhadap output. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah, walaupun pada awalnya mengakibatkan penurunan output, namun akan meningkatkan output dan inflasi pada periode selanjutnya.

Menurut Alfonso dan Leal (2018), fiskal multiplier (multiplier Keynesian) didefinisikan sebagai rasio dari perubahan output ke kesatuan perubahan eksogen dalam keseimbangan fiskal, yang didorong oleh perubahan dalam pengeluaran pemerintahan atau penerimaan pajak. Efek tersebut mengasumsikan bahwa, menurut terori Keynes peningkatan keseimbangan fiskal merangsang tingkat konsumsi domestik, PDB dan pendapatan Negara, menghasilkan siklus dinamika. Sedangkan menurut analisis tradisional berdasarkan model Mundell Fleming, fiskal multiplier diperkirakan mendekati nol di ekonomi dengan nilai tukar mengambang yaitu pengeluaran pemerintah akan menghasilkan tekanan pada tingkat bunga, mengurai net ekspor karena apresiasi mata uang dan peningkatan permintaan mata uang dan mengimbangi efek pengeluaran pemerintah.

Perekonomian yang stabil menurut aliran Keynesian tidak berjalan dengan sendirinya, intervensi pemerintah memegang peranan penting untuk memastikan perekonomian kearah keseimbangan. Ketika perekonomian mengalami resesi (pendapatan menurun dan tingkat pengangguran meningkat secara tajam) dan perekonomian mengalami *over heating* dimana laju inflasi

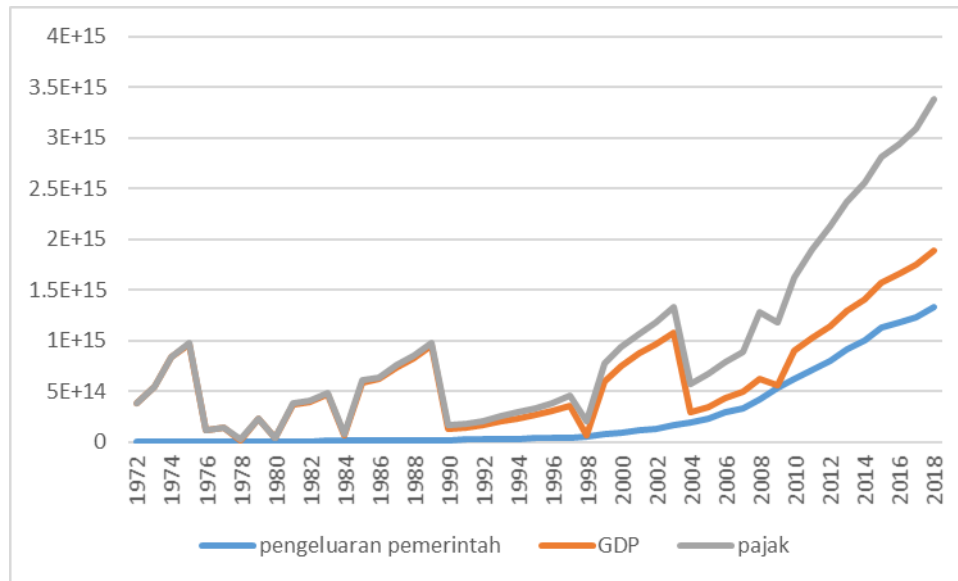
tinggi (pendapatan riil menurun) maka pemerintah melalui instrumen kebijakannya harus melakukan intervensi agar perekonomian stabil kembali. Salah satu kebijakan yang digunakan adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah dalam mengarahkan perekonomian melalui instrumen pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Intervensi yang tepat dari pemerintah melalui kebijakan fiskal diharapkan perekonomian akan stabil kembali sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi yang meningkat berarti pendapatan masyarakat meningkat.

Di Indonesia pengeluaran dan penerimaan pemerintah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui APBN maka disusun target penerimaan dan pengeluaran yang harus dicapai dalam waktu tertentu agar misi alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian tercapai. Target penerimaan terutama berasal dari pajak (*tax*) yang hasilnya digunakan untuk membiayai target pengeluaran pemerintah. Kombinasi penerimaan dan pengeluaran melalui kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan sehingga muncul dampak eksternalitas positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang, kebijakan fiskalnya mempunyai peranan yang dinamis disebabkan karena Negara kita termasuk yang pendapatan perkapitanya rendah, tingkat tabunganya rendah dan jumlah atau tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu kebijakan fiskal dirancang pemerintah untuk mengakumulasi modal tersebut ke saluran-saluran yang produktif untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan nasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilxetzki dkk (2010), yang menggunakan data set riwulan dari pengeluaran pemerintah di 44 negara, menunjukkan bahwa: pertama, efek output dari peningkatan konsumsi pemerintah

lebih besar industri Indonesia dari pada di Negara-negara berkembang. Kedua, fiskal multiplier di ekonomi Indonesia yang beroperasi dibawah nilai tukar yang telah ditentukan namun tidak mempunyai efek di ekonomi yang beroperasi dibawah nilai tukar yang fleksibel. Ketiga, fiskal multiplier di ekonomi terbuka lebih rendah dari pada ekonomi tertutup. Keempat, fiskal multiplier dinegara-negara yang mempunyai utang tinggi juga mempunyai hasil nol. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Alfonso dan Leal (2018) yang menggunakan data set triwulan pada tahun 2000-2016 di Negara-negara Eropa hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek positif pada output sedangkan multiplier pajak menunjukkan tanda-tanda negatif. Tanda-tanda negatif tersebut yaitu pemotongan pajak tenaga kerja menyebabkan rumah tangga meningkatkan tenaga kerja penawaran, menghasilkan penurunan upah dan biaya marginal yang lebih rendah menghasilkan penurunan inflasi. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ray dkk (2012) mengenai berbagai aspek konsolidasi fiskal di 18 negara OECD. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa fiskal multiplier berbeda disetiap Negara karena struktur dan perilaku ekonomi yang berbeda. Hal tersebut bergantung pada faktor-faktor instrumen fiskal yang diterapkan, respon kebijakan terhadap inovasi fiskal, dan harapan oleh pelaku ekonomi.

Gambar 1.1 menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pajak dengan pertumbuhan GDP yang ada di Indonesia pada tahun 1972 sampai tahun 2018. Grafik dibawah ini akan menunjukkan bagaimana sebaran yang diperlihatkan antara pengeluaran pemerintah dan pajak dengan pertumbuhan GDP yang ada di Indonesia.



Gambar 1.1 Presentase Pengeluaran Pemerintah , Pertumbuhan GDP Dan Pajak

Sumber data world bank dari tahun 1969 sampai tahun 2018

Gambar 1.1 diatas menjelaskan jika GDP dan pajak secara keseluruhan berfluktuasi dari tahun 1972 sampai tahun 2018. Sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berjalan mengikutii tren. Secara keseluruhan apabila penerimaan pemerintah dan pajak mengalami peningkatan maka GDP mengalami peningkatan sedangkan ketika penerimaan pemerintah dan pajak mengalami penurunan maka GDP juga mengalami penurunan. Sedangkan pada gambar diatas pengeluaran pemeritah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun naiknya tidak beriringan dengan varibel GDP dan pajak.

Hambatan besar dalam memperoleh perkiraan yang tepat dari fiskal multiplier adalah ketersediaan data. Sebagian besar peneliti mengandalkan data set triwulanan yang mencakup Negara berkembang dan Negara maju. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, peneliti menggunakan data set tahunan dan

lebih fokus ke Negara Indonesia . Cakupan tersebut bermula pada tahun 1972 sampai tahun 2018. Peneliti telah berusaha keras untuk memastikan bahwa hanya data tahunan yang semula dikumpulkan secara tahunan dimasukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEK MULTIPLIER KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA”**. Sejauh mana efek multiplier dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Perekonomian Indonesia dalam kondisi makro senantiasa berfluktuasi dan cenderung tidak stabil. Pemerintah menghadapi berbagai permasalahan dari tahun 1972 sampai tahun 2018 sehingga pemerintah belum berhasil menciptakan stabilitas ekonomi makro yang merupakan prasyarat dalam rangka mencapai tujuan perekonomian. Indikator ekonomi makro seperti: GDP riil, GDP nominal, pengeluaran pemerintah nominal, pengeluaran pemerintah riil, modal pemerintah dan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana efek multiplier kebijakan fiskal di Indonesia dari tahun 1972 sampai tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dan menghitung besaran multiplier kebijakan fiskal di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai salah satu upaya dalam mengkaji ilmu ekonomi pembangunan dalam fiskal multiplier serta faktor apa saja yang menjadi penentu multiplier di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran serta menjadi rujukan konsep-konsep baru dalam mengembangkan ilmu ekonomi khususnya bidang fiskal multiplier.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan pemerintah terkait pembangunan ekonomi di Indonesia.